

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA TANGGAP COVID-19 DI DESA JELAT KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Yahya Muhaemin<sup>1</sup> Endah Vestikowati<sup>2</sup> Asep Nurwanda<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : hamimalfabeth01@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil observasi yang dilakukan dan menemukan suatu masalah yaitu kurang optimalnya implementasi kebijakan Desa tanggap Covid-19 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi kebijakan Desa tanggap Covid-19 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan dengan teknik sampling purposive pada penelitian ini yaitu sebanyak 4 (empat) orang. dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dalam dimensi ukuran dan tujuan kebijakan sudah optimal, dalam dimensi sumber daya belum optimal, dalam dimensi karakteristik agen pelaksana belum optimal, dalam dimensi sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana sudah optimal, dalam dimensi komunikasi antar-organisasi dan aktivis pelaksana sudah optimal, dalam dimensi lingkungan ekonomi, sosial dan politik sudah optimal.*

**Kata kunci :** *Implementasi Kebijakan, Desa, Desa Tanggap Covid-19*

## PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 ini menjadi ancaman yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia maupun dunia. Seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia mengalami kesusahan pada sendi-sendi kehidupan masyarakatnya, yaitu di bidang kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, politik dan ekonomi.

Pemberlakuan *physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PPKM dan istilah lainnya memaksa masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

Dalam menanggulangi wabah Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk juga Indonesia, berbagai kebijakan ditetapkan agar penanganan Covid-19 mempunyai payung hukum

legal. Kebijakan yang dikeluarkan berbeda satu negara yang satu dengan yang lain. Meski demikian, semua kebijakan yang dikeluarkan tersebut merupakan cara pemerintah untuk penanggulangan penyebaran Virus Corona dari satu orang kepada yang lain. Bahkan di Indonesia, setiap daerah mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa, pun RT/RW memiliki aturan terkait usaha mengatasi penularan virus ini. Termasuk juga Desa Jelat yang terletak di kabupaten Ciamis ini.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang memberikan pengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi perlu menjadi kajian bersama terutama pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah Pusat perlu membuat regulasi agar PSBB berjalan dengan baik dan dampaknya dapat diminimalisir. Sementara itu Pemerintah di bawah Pemerintah Pusat berusaha mengimplementasikan apa yang telah menjadi regulasi dari Pemerintah Pusat.

Pandemi ini juga telah menyusahkan perekonomian yang semula berjalan normal yang berdampak pada kehidupan masyarakat Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini yang mengharuskan pemerintah bekerja keras agar dampak yang ditimbulkan akibat COVID-19 ini bisa diminimalisasi. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah saling bekerjasama dalam membuat regulasi

dalam penanganan COVID-19.

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa yang dimaksud Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Langkah lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Surat edaran tersebut ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2020, sebagai acuan masyarakat desa dalam hal pelaksanaan Desa Tanggap COVID-19 serta penggunaan dana desa sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat akibat dampak COVID-19. Selanjutnya surat edaran tersebut juga menjadi salah satu dasar dan acuan pemerintah desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, sebagai upaya peningkatan kewaspadaan atas resiko penularan COVID-19 terhadap warga masyarakatnya.

Dalam hal ini Pemerintah Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis melakukan berbagai upaya dalam menjalankan Undang-undang, Surat Edaran Kemendes maupun kebijakan daerah Kabupaten Ciamis untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 tersebut, mengingat lokasi Desa Jelat menjadi jalan utama yang

kemungkinan besar bisa memicu penyebaran Covid 19 yang ada di Daerah Ciamis.

Di Kabupaten Ciamis sendiri sudah dinyatakan zona merah, untuk itu di Kabupaten Ciamis sedang gencar-gencarnya terkait dengan penanganan kasus Covid -19 termasuk di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, realita yang terjadi di lapangan implementasi kebijakan yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam dimensi sumber daya yaitu SDM, Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, seperti memakai masker ketika keluar rumah, rajin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, menghindari kerumunan dan juga masih rendahnya kedisiplinan petugas Satgas Covid-19 dalam penegakan protokol kesehatan.
2. Dalam dimensi sumber daya yaitu sumber daya waktu yang digunakan dalam Edukasi penyemprotan disinfektan yang kurang berkesinambungan oleh petugas.
3. Dalam dimensi sumber daya yaitu berupa sarana dan prasarana masih belum optimal, hal tersebut bisa dilihat dari masih minimnya alat kesehatan deteksi dini Covid-19 seperti pengukur suhu.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Van Meter & Van Horn (Wahab 2002:65)

Implementasi ialah pelaksanaan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Agustino (2008:139) mengatakan bahwa: "Implementasi merupakan

suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta untuk mencapai tujuan-tujuan serta untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.

Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang baik pemerintah maupun swasta bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, untuk melaksanakan atau merealisasikan target yang hendak dicapai. Implementasi merupakan salahsatu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

Dari teori tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan merupakan proses dan tujuan untuk menetapkan satu hasil/produk yang akan di implementasikan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan (disposition) para

pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

### **Pengertian Kebijakan**

Dewasa ini mungkin kita sudah tak asing lagi mendengar kata kebijakan karena kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau perilaku pemerintah. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich (Wahab, 2004:3) mengemukakan bahwa :

Kebijakan adalah suatu tindakanyang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintahdalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Rian Nugroho (2003:145) mengatakan bahwa: “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuan lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak lebih dan tidak kurang.”

Sedangkan menurut Nugroho (2016:16) bahwa:

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali dicampuradukkan dengan kebijakan (*wisdom*). Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam prose pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan didalam mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya.

Kemudian Hasbullah (2015:37) menyatakan bahwa: “Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas, kata ‘*policy*’ yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum atau berarti juga administrasi pemerintahan”.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya.

### **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Kajian klasik Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2020:146) mendefinisikan kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk Undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Wahab (2015:43) mengemukakan beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan:

1. Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk UU, Peraturan pemerintah, Keputusan Peradilan, Kepmen, dll.
2. Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

3. Implementasi yaitu bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkannya akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah: "Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang)".

Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: Perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2006:65).

Agustino (2020:146) Dari beberapa pengertian seperti yang tertuang diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yakni :

1. Adanya tujuan atau sasaran
2. Adanya aktivitas atau, dan
3. Adanya hasil.

Namun ini saja belum cukup, ini karena implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan tersebut tercapai.

### **1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

- a. Van Meter dan Van Horn

Alasan peneliti memilih teori dari Van Metter dan Van Horn karean menurut peneliti teori tersebut lebih mudah difahami dan juga lebih cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

Menurut Van Meter dan Van horn (Agustino 2020:150-153), terdapat enam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu:

b. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja Implementasi Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran Kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

c. Sumber daya

Keberhasilan dalam proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan sebuah keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika implementasi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhatikan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini

karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka akan timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan demikian pula dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

d. Karakteristik agen pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misanya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

e. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat

mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal bentuk persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

f. Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.

g. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

h. George C. Edward III

Menurut George C. Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan apa atas apa yang mereka kerjakan dapat berjaan bila komunikasi berjalan dengan baik

sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

3. Disposisi

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan.

5. Merilee S. Grindle

Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes*. Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan



- merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai,. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
    - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok
    - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya sumber data primer dalam penelitian ini yaitu informan sebanyak 4 (empat) orang diantaranya yaitu Kepala Desa Jelat 1 (satu) orang, Ketua Satgas Covid-19 Desa Jelat 1 (satu) orang, Kepala Dusun 1 (satu) orang, Tokoh Masyarakat 1 (satu) orang. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu observasi dan wawancara. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah pertama, pertama menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini terbaik di bidang kajiannya, kedua peneliti menggunakan metode penelitian ini karena sifat dari masalah yang akan diteliti (Afrizal, 2014). Alasan lain peneliti menggunakan metode kualitatif adalah

karena permasalahan dan fakta yang ditemukan akan lebih tepat jika menggunakan metode kualitatif karena data yang diperoleh berupa data kualitatif, bukan berupa angka sehingga hasil penelitian tentang suatu fenomena yang terjadi akan lebih akurat.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dapat diketahui sebagai berikut :

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Faktor pertama yang mempengaruhi terhadap kinerja implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja Implementasi Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran Kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil (Agustino, 2020:151).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam Ukuran dan Tujuan Kebijakan ini terdapat 2 (dua) indikator yaitu para pelaksana memahami ukuran kebijakan dan para pelaksana memahami tujuan kebijakan,

dalam hal ini kedua indikator tersebut tidak ditemukan hambatan.

Dalam indikator para pelaksana memahami ukuran kebijakan dan tujuan kebijakan ukuran. Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 ini sudah sangat ideal untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 para petugas yakni Satgas Covid-19 sudah bekerja secara maksimal dan juga cukup memahami terkait dengan ukuran kebijakan Desa Tanggap Covid-19 yang mana penyebaran dan penanganan terhadap Virus Covid-19 ini bisa maksimal khususnya di Desa Jelat. Jika Satgas tersebut sudah memahami terkait dengan ukuran kebijakan Desa Tanggap Covid-19 sesuai dengan regulasi yang ada. Tujuan dan ukuran kebijakan Desa Tanggap Covid-19 yang tertera dalam SE Kemendesa Nomor 8 Tahun 2020 ini sudah difahami oleh Satgas Covid-19 Desa Jelat. Kemudian juga terdapat buku panduan yang dipakai oleh petugas yang inisiatif diperbanyak dan juga dibagikan kepada setiap anggota Satgas Covid-19 Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabpuaten Ciamis.

## **2. Sumber daya**

Sumber daya bukan hanya yang selalu bersifat fisik, tapi ada juga yang nonfisik. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. (Van Meter & Van

Horn, dalam Agustino, 2020:151).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam sumber daya ini terdapat 5 (lima) indikator yaitu jumlah SDM yang sudah memadai untuk melaksanakan program implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19, SDM mempunyai pengetahuan tentang Desa Tanggap Covid-19, adanya anggaran dana yang cukup, adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Desa setempat, dan waktu yang tepat untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi.

Dalam indikator SDM yang sudah memadai untuk melaksanakan program Desa Tanggap Covid-19 dikatakan sudah optimal, hal tersebut bisa dilihat dari team Satgas Covid-19 yang melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari Ketua RT dan juga Ketua RW masuk dalam Team satgas Covid-19, bahkan Karang Tarunapun ikut terlibat dalam hal ini. Untuk tenaga kesehatan juga ada di Desa Jelat, karena Implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 juga pasti membutuhkan tenaga kesehatan yang lebih mengerti tentang Virus Covid-19 ini.

Dalam indikator SDM mempunyai pengetahuan tentang Desa Tanggap Covid-19 bisa dikatakan sudah optimal. Petugas Satgas Covid-19 Desa Jelat sudah cukup memahami tentang bagaimana Program Desa Tanggap Covid-19 itu dijalankan. Buku pedoman yang diperbanyak dan dibagikan merupakan salahsatu alternatif agar semua petugas Satgas

Covid-19 Desa Jelat bisa membaca dan memahaminya jika ada yang tidak difahami. Namun tidak semua petugas Satgas Covid-19 membaca buku pedoman tersebut dirumah masing-masing, kemudian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut yaitu membahas buku pedoman tersebut secara bersama-sama ketika sedang berada di kantor Desa.

Dalam indikator adanya anggaran dana yang cukup terkait dengan implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 bisa dikatakan belum optimal. dana yang digunakan dalam pencegahan Covid-19 ini berasal dari APBDes sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Jelat Nomor 6 tahun 2021 tentang pembentukan team pos komando (POSKO) penanganan pandemi Covid-19 di tingkat Desa yaitu sebesar 8% dan kemudian jumlah itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan di buatkan jadwal. Dengan terus diperpanjangnya PPKM oleh Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Desa kewalahan, dan pada akhirnya pencegahan dan penanganan oleh Stgas Covid-19 belum optimal, seperti penyemprotan disinfektan yang tidak berkesinambungan dan juga belum meratanya alat deteksi kesehatan dini di setiap wilayah RT. Upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan pemasukan yang didapat dari luar baik dari pribadi maupun dari Pemerintah Pusat.

Dalam indikator adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah Desa bisa dikatakan sudah

maksimal, hal itu dapat dilihat dari di setiap RW terdapat posko penanganan Covid-19, di setiap fasilitas umum dan juga tempat ibadah seperti mesjid dan musholla tersedia tempat cuci tangan, disediakannya juga tempat isolasi mandiri oleh Pemerintah Desa bagi yang terpapar Virus Covid-19 walaupun sampai saat ini belum ada yang melakukan isolasi mandiri di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa tersebut.

Dalam indikator waktu yang tepat untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi dikatakan belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari sosialisasi tentang Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan petugas melalui kendaraan berupa mobil tidak sampai ke gang-gang kecil hanya di jalan yang bisa dilewati saja, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama supaya dalam mengadakan acara selalu diselipkan sosialisas tentang pentingnya protokol kesehatan. Kemudian juga penyemprotan yang kurang berkesinambungan dari petugas diakibatkan dari minimnya dana.

### **3. Karakteristik agen pelaksana**

Sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang ingin dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk

melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias (Van Meter & Van Horn dalam Agustino, 2020:157).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam karakteristik agen pelaksana terdapat 2 (dua) indikator yaitu kedisiplinan Satgas Covid-19 dalam penegakan protokol kesehatan dan kesiapsiagaan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan kebijakan Desa Tanggap Covid-19 dalam indikator kedisiplinan Satgas Covid-19 dalam penegakan protokol kesehatan belum optimal dan indikator kesiapsiagaan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan kebijakan Desa Tanggap Covid-19 sudah optimal.

Dalam indikator kedisiplinan Satgas Covid-19 dalam penegakan protokol kesehatan dikatakan belum optimal dilihat dari dalam penegakan protokol kesehatan terhadap masyarakat yang kedapatan tidak mengindahkan protokol kesehatan belum adanya sanksi yang sesuai, upaya yang dilakukan petugas Satgas Covid-19 hanya melakukan teguran terhadap masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut.

Dalam indikator kesiapsiagaan Satgas Covid-19 dalam pelaksanaan kebijakan Desa Tanggap Covid-19 sudah optimal dilihat dari kesiapsiagaan petugas dalam hal pendataan terhadap masyarakat yang terindikasi virus Covid-19 dan juga pencegahan dalam hal penyemprotan yang dilakukan oleh petugas Satgas Covid-19 di wilayah Desa Jelat.

#### **4. Sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana**

Sikap atau kecenderungan para pelaksana terkait dengan penolakan atau penerimaannya terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan dari pada suatu implementasi kebijakan. Hal itu mungkin saja terjadi disebabkan kebijakan yang mereka jalankan bukanlah hasil dari musyawarah atau formulasi warga tersebut, karena mereka yang lebih mengetahui terhadap permasalahan yang dirasakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam sikap atau kecenderungan para pelaksana terdapat 2 (dua) indikator yaitu Satgas Covid-19 memahami terkait dengan Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 dan Satgas Covid-19 mampu menjalankan terkait dengan Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19, dalam hal ini kedua indikator tersebut sudah maksimal.

Dalam indikator Satgas Covid-19 memahami terkait dengan Implementasi Kebijakan Dsa Tanggap Covid-19 dapat dikatakan sudah optimal bisa dilihat dari cara penanganan yang baik dari petugas

Dalam indikator Satgas Covid-19 mampu menjalankan terkait dengan Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 dapat dikatakan sudah optimal bisa dilihat dari ketegasan satgas Covid-19 dalam penegakan protokol kesehatan dan juga sosialisasi yang dilakukan.

## **5. Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana**

Faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan terkait Desa tanggap Covid-19 adalah komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa dan juga gugus tugas karena dasarnya merekalah yang akan menjalankan kebijakan tersebut, diluar pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana terdapat 3 (tiga) indikator yaitu adanya Komunikasi antara Satgas Covid-19 dan Pemerintah Desa, adanya Komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat, dan melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, dalam 3 (tiga) indikator tersebut dikatakan sudah optimal.

Dalam indikator adanya Komunikasi antara Satgas Covid-19 dan Pemerintah Desa bisa dikatakan cukup optimal dapat dilihat dari penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 yang bisa dikendalikan.

Dalam indikator adanya Komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat dapat dilihat dari kerjasama yang baik antara masyarakat dan Pemerintah Desa dalam kasus penyebaran Covid-19 serta keduanya saling mengerti.

Dalam indikator melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dikatakan optimal dapat dilihat dari kesiapsiagaan keduanya dalam

penanganan kasus Covid-19 yang terjadi di masyarakat.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Hal terakhir yang tidak kalah penting dalam menilai suatu keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn yaitu lingkungan, sejauhmana lingkungan tersebut yang terdiri dari lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan juga lingkungan politik dalam membantu keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik terdapat 2 indikator yaitu pelaksanaan implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 memerlukan koordinasi dan adanya dukungan dari masyarakat pada program Desa Tanggap Covid-19, hal tersebut bisa dikatakan sudah optimal.

Dalam indikator pelaksanaan implementasi kebijakan Desa Tanggap Covid-19 memerlukan koordinasi dikatakan optimal dapat dilihat dari pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu dari berbagai unsur masyarakat, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Dalam indikator adanya dukungan dari masyarakat pada program Desa Tanggap Covid-19 bisa dikatakan optimal bisa dilihat dari kesadaran masyarakat dalam protool kesehatan kemudian juga ketika ada bantuan terhadap yang melakukan isolasi mandiri tidak ada penolakan karena keduanya sudah saling mengerti. Pada program vaksinasi juga

cukup antusias dari masyarakatnya, semakin kesini semakin faham tentang pentingnya vaksinasi walaupun pada awal-awal masih bertanya-tanya, tetapi karena sosialisasi yang mudah dimengerti akhirnya masyarakat juga faham.

## **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan Desa tanggap Covid-19 di Desa Jelat Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis secara keseluruhan dalam pelaksanaan tahapan sampai dengan pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya bahkan cenderung baik namun belum optimal, semua tahapan yang dilakukan sudah sesuai dengan SE Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia dari mulai membentuk struktur relawan Desa lawan Covid-19, melakukan pencegahan dan juga melakukan penanganan terhadap korban Covid-19.

Ukuran dan tujuan kebijakan ini yaitu Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 ini sudah sangat ideal untuk memutus rantai penyebaran Virus Covid-19 para petugas yakni Satgas Covid-19 sudah bekerja secara maksimal dan juga cukup memahami terkait dengan ukuran kebijakan Desa Tanggap Covid-19 yang mana penyebaran dan penanganan terhadap Virus Covid-19 ini bisa maksimal khususnya di Desa Jelat.

Sumber daya pada Implementasi Kebijakan Desa Tanggap Covid-19 ini masih belum optimal,

dalam Dengan terus diperpanjangnya PPKM oleh Pemerintah Pusat membuat Pemerintah Desa kewalahan, dan pada akhirnya pencegahan dan penanganan oleh Stgas Covid-19 belum optimal, seperti penyemprotan disinfektan yang tidak berkesinambungan dan juga belum meratanya alat deteksi kesehatan dini di setiap wilayah RT. Upaya yang dilakukan yaitu memaksimalkan pemasukan yang didapat dari luar baik dari pribadi maupun dari Pemerintah Pusat.

Dalam dimensi sumber daya yaitu waktu, waktu yang tepat untuk melakukan edukasi melalui sosialisasi dikatakan belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari sosialisasi tentang Desa Tanggap Covid-19 yang dilakukan petugas melalui kendaraan berupa mobil tidak sampai ke gang-gang kecil hanya di jalan yang bisa dilewati saja, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama supaya dalam mengadakan acara selalu diselipkan sosialisas tentang pentingnya protokol kesehatan. Kemudian juga penyemprotan yang kurang berkesinambungan dari petugas diakibatkan dari minimnya dana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. (2002). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdul Wahab, Solichin. (2004). *Analisis Kebijakan: Dari*

- Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin, (2006), *Analisis Kebijakan dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahhab Solichin, (2015), *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Edisi ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, D, Riant, (2003), *Kebijakan Publik: Formulasi, Impementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung.:Alfabeta.
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID—19)
- Mendes. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.